

Daftar kekurangan kelengkapan yang harus diisi dan dilengkapi oleh Sdr. RAHMA DEFI (3374095004760007),
KEPALA BIDANG - PEMERINTAH KOTA SEMARANG:

JENIS	URAIAN
Surat Kuasa	Mohon dikirimkan ke KPK Lampiran IV Surat Kuasa yang dicetak dan ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000 atas nama: 1. RAHMA DEFI (Penyelenggara Negara) 2. ADRI IMAN PATRIA (Suami) 3. MUHAMMAD YAHYA (Anak Tanggungan) 4. NAJWA SAFFANA REFALDY (Anak Tanggungan) (Jika sudah mengirimkan Surat Kuasa, maka koreksi atas Surat Kuasa ini dapat diabaikan, jika ada kesulitan silakan konfirmasi ke nomor telepon Call Center LHKPN 198)

Keterangan :

1. Jika terdapat kekurangan kelengkapan Surat Kuasa dalam **tabel daftar kekurangan kelengkapan di atas**, mohon Surat Kuasa dicetak melalui aplikasi e-Filing LHKPN dan ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000 oleh setiap nama yg disebutkan dalam uraian dan dikirimkan format aslinya ke alamat :

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi

Gedung Merah Putih KPK – Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950

2. Bagi yang melaporkan LHKPN dengan menggunakan aplikasi e-Filing LHKPN (*online*) daftar kekurangan (selain surat kuasa) dapat dilengkapi dan diperbaiki melalui melalui elhkn.kpk.go.id
3. Wajib LHKPN mengirimkan kekurangan dokumen tersebut maksimal 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi oleh Wajib LHKPN. Dalam hal Wajib LHKPN belum menyampaikan dokumen sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Tim Verifikasi KPK

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : RAHMA DEFI

Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA / 10 April 1976

Nomor KTP/NIK : 3374095004760007

Alamat : JL CEMARA I/B-65 PLAMOGAN INDAH, PLAMONGANSARI, PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak diandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

10-March-2024
Pemberi Kuasa,



(RAHMA DEFI)

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : NAJWA SAFFANA REFALDY
Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA BARAT / 29 Januari 2004
Nomor KTP/NIK : 3374096901040001
Alamat : JL CEMARA I/B-65 PLAMOGAN INDAH, Kelurahan PLAMONGANSARI, Kecamatan PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG , Provinsi JAWA TENGAH

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak diandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



10-March-2024
Pemberi Kuasa,

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(NAJWA SAFFANA REFALDY)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : MUHAMMAD YAHYA
Tempat/Tanggal Lahir : YOGYAKARTA / 25 September 2003
Nomor KTP/NIK : 3374062509030005
Alamat : JL. CEMARA I/B-65 PLAMOGAN INDAH, Kelurahan PLAMONGANSARI, Kecamatan PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG , Provinsi JAWA TENGAH

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), bertempat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuai apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah



(MUHAMMAD YAHYA)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : ADRI IMAN PATRIA
Tempat/Tanggal Lahir : PADANG / 31 Mei 1966
Nomor KTP/NIK : 3374063105660002
Alamat : JL CEMARA /B-65 PLAMOGAN INDAH, Kelurahan PLAMONGANSARI, Kecamatan PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG, Provinsi JAWA TENGAH

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah



10-March-2024
Pemberi Kuasa,

(ADRI IMAN PATRIA)